

KALÉBUN BÂBINÉ' DAN KONSTRUKSI BUDAYA MASYARAKAT MADURA DALAM MELESTARIKAN KEKUASAAN

Tatik Hidayati

Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
Bukit Lancaran Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep 69463
E-mail: tatikgpr@gmail.com

Abstrak

Fenomena *kaléibun bâbiné'* (kepala desa perempuan) pada masyarakat Madura tidak jarang hanya sebagai penerus dan melestarikan kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh suami, bapak atau bahkan kakek mereka. Sehingga tulisan ini bermaksud mengungkap: *pertama*: bagaimana konstruksi budaya Madura tentang peran dan posisi perempuan sebagai *kaléibun*. *Kedua*, bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh kaum laki-laki dalam menempatkan perempuan sebagai penerus kekuasaan politik pada kekuasaan desa. *Ketiga*, bagaimana relevansi potensi dan kompetensi perempuan dalam posisinya sebagai *kaléibun*. Selanjutnya tulisan ini akan menggunakan empat pendekatan: *pertama*, pendekatan subjektif, dimaksudkan untuk mengetahui alasan atau motif serta apa yang sebenarnya diinginkan perempuan ketika menjabat sebagai *kaléibun*. *Kedua*, pendekatan relasional, yaitu melihat pola relasi yang terbangun dalam keluarga dan masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, proses menjadi *kaléibun bâbiné'* telah memunculkan relasi dominatif dan subordinat melalui *public transcript*. *Ketiga*, pendekatan struktural, institusi *kaléibun* dimaksudkan untuk membuat tatanan masyarakat yang bermartabat, dikotori oleh praktik-praktik politik kekuasaan yang tanpa makna dengan membolehkan berbagai cara, termasuk menjadi perempuan sebagai objek keberlangsungan kekuasaan. *Keempat*, tulisan ini sebagai seruan moral untuk membangun kesadaran kolektif untuk mengedepankan politik makna, dengan menjunjung integritas dalam kepemimpinan.

Abstract

Phenomenon of '*kaléibun bâbiné'* (women village head) in Madura is only a regular activity to keep the power that owned by their husband, father, or grandfather. It explains *firstly*, how the culture construction in Madura about the female role and position as leader. *Secondly*, how the mechanism is done by male in keeping female as continue their power. *Thirdly*, how the potential relevancy and competency of female in her position as leader. Furthermore, this study employs four approaches, the first is subjective approach, it is to know the reason why female want to be a leader. The *second*, relational approach, it is to know the relation made in family and society between male and female. In this context, the process of being *kaléibun bâbiné'* shows relationship between dominative and subordinate through public transcript. The *third*, structural approach, institution

of *kaléibun* is to make social class in society which has good prestige become the bad one because of the clever trick in having female as the object in keeping power. The *fourth*, this study is a warning to make all realize in order they can be meaningful political act by taking integrity as the priority.

Kata-kata Kunci:

Kaléibun bâbiné', Madura, konstruksi budaya, kekuasaan

Pendahuluan

Masyarakat Madura menyebut pemimpin pada lingkup desa dengan istilah *kaléibun*, atau kepala desa, atau lurah sebagaimana sebutan yang digunakan pada masyarakat Jawa pada umumnya. Di Madura dengan budaya masyarakat yang agamis menempatkan *kaléibun* ini sebagai pemimpin administratif yang bersifat formal,¹ sehingga masyarakat membutuhkannya untuk keperluan yang bersifat administratif pemerintahan.

Dengan demikian, posisi *kaléibun* bukan posisi keagamaan, melainkan lebih pada fungsi informatif dan fungsi konsolidasi.² Fungsi informatif dimaksudkan

bahwa *kaléibun* memberi informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi administrasi pemerintahan dan program-program pemerintah yang memerlukan keterlibatan masyarakat secara langsung. Sedangkan dalam fungsi konsolidasi, *kaléibun* mengonsolidasikan berbagai kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat untuk pelaksanaan suatu program atau acara tertentu yang biasanya bersifat nasional atau daerah.

Hal ini secara umum berbeda dengan fungsi kepala desa atau pun lurah di daerah Jawa yang tidak hanya diperlukan pada urusan administratif belaka, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. Sedangkan persoalan sosial kemasyarakatan sampai pada urusan agama hampir semua diperankan oleh tokoh informal, yaitu pemimpin keagamaan yang biasa disebut ulama atau kiai.

Kata *bâbiné'* adalah sebutan untuk mengatakan perempuan pada masyarakat Madura. Perempuan mendapat tempat dan perhatian tersendiri dalam budaya Madura. Ia dihormati sebagai seorang ibu, dijaga ketika menjadi anak, dan menjadi simbol kehormatan ketika menjadi istri. Dalam posisi budaya tersebut, tidak jarang keberadaan perempuan di ruang publik merupakan representasi

¹ Sebagaimana diungkapkan oleh Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002). Dalam tulisan lain Huub de Jonge mengatakan bahwa *kaléibun* ini biasanya mempunyai kedekatan dengan preman atau blater. Lihat Huub de Jonge, "Pembentukan Negara dengan Kontrak: Kabupaten Sumenep Madura, VOC dan Hindia Belanda, 1683-1883" dalam *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*, ed. Huub de Jonge (Jakarta: Rajawali Pers, 1989). Rozaki juga mengungkapkan hal yang sama. Lihat Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa* (Jogjakarta: Pustaka Marwa, 2004). Bahkan dalam penelitian Saputra dikatakan *kaléibun* mempunyai budaya yang bertentangan dengan budaya kiai. Lihat Endy Saputra, *Kiai Langgar and Kaléibun* (Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University, 2009)

² Tatik Hidayati, *Nyai Madura: Relasi Patron Klien dengan Perempuan Pedesaan* (Disertasi

Program Pascasarjana UGM Yogyakarta, 2012). Idem, *Kompolan: Kontestasi Tradisi Perempuan Madura*, (Jakarta: Penelitian Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010)

dari keberadaan kaum laki-laki. Padahal dalam beberapa penelitian perempuan di Madura mempunyai potensi dan kompetensi dalam transformasi dan pemberdayaan perempuan di pedesaan.³ Fenomena *kaléibun bâbiné'* (kepala desa perempuan) pada masyarakat Madura yang semakin merebak, tidak jarang hanya sebagai penerus dan melestarikan kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh suami, bapak, atau bahkan kakek mereka. Sehingga kontruksi yang dibungkus dengan budaya masyarakat yang kuat, dan tidak jarang mendapat legitimasi dari agama (yang direpresentasikan oleh tokoh agama) cenderung memandang dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak memiliki kompetensi.

Meskipun demikian, modus pelestarian kekuasaan dengan menjadikan perempuan sebagai pemimpin penerus juga menjadi fenomena di berbagai daerah. Tidak hanya pada tingkat desa, melainkan juga pada tingkat kabupaten,⁴ provinsi, dan bahkan negara sebagai presiden.⁵ Secara legal formal, tidak ada larangan untuk menerapkan hal ini, namun demikian jika didasarkan pada kemampuan yang dimiliki kaum perempuan itu harus kita apresiasi. Persoalannya adalah tidak jarang modus ini digunakan hanya semata-mata meneruskan kekuasaan dan menyelamatkan kekuasaan kaum laki-laki, supaya kebobrokan dan kejahatan yang dilakukan tidak terungkap. Lebih lanjut, tidak jarang dalam posisi demikian perempuan menjadi pemimpin hanya sebagai simbol, sehing-

ga pola kepemimpinan yang dijalankannya cenderung tidak efektif atau cenderung stagnan dalam tingkat pengambilan keputusan. Hal ini karena yang menjalankan kepemimpinan bukan *kaléibun*, tetapi pihak lain. Sementara *kaléibun bâbiné'* ini hanya *noro'*.⁶

Pada bulan Mei 2013 tahap pertama dan Oktober 2014 tahap kedua ini adalah bulan di mana kebanyakan desa di Kabupaten Sumenep yang telah habis masa kepemimpinan kepala desanya akan mengadakan pemilihan. Penulis menjumpai sepanjang perjalanan penulis di saat mengajar dengan jarak tempuh 40 KM di beberapa desa yang akan mengadakan pemilihan hampir semua mempunyai calon kepala desa perempuan. Ini berbeda dengan kesulitan yang dialami oleh beberapa partai untuk mengusung calon legislatif perempuan guna memenuhi kuota. Hal ini menjadi fenomena yang menarik di tengah tarik-menarik antara perebutan kekuasaan eksekutif pada tataran yang paling rendah yaitu desa dengan kekuasaan legislatif yang ada di atasnya. Di mana kaum perempuan desa ini lebih tertarik menjadi kepala desa daripada menjadi calon legislatif. Padahal keduanya sama-sama membutuhkan modal kapasitas dan modal finansial.

Melihat beberapa peristiwa dan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep, penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana fenomena

³ Ibid.

⁴ Sebagaimana terjadi di Bantul Yogyakarta, di Indramayu Jawa Barat, dan berbagai daerah lain.

⁵ Ide untuk mencalonkan Ani Yudoyono istri dari SBY, bahkan hal ini pernah dilakukan oleh presiden Amerika, Bill Clinton.

⁶ *Noro'* adalah mengikuti kemauan tanpa diikuti pengetahuan. Sebagaimana penulis temui di desa Ambunten Barat kecamatan Ambuten, terdapat seorang *kaléibun* perempuan yang dimaksudkan meneruskan kekuasaan kakeknya. Dalam menjalankan pemerintahan, ia memasrahkan pada kakak iparnya (suami dari kakak perempuan). Data ini penulis peroleh di saat satu bulan mendampingi mahasiswa KKN di daerah tersebut pada bulan Juni-Juli 2012.

kaléibun perempuan di tengah budaya dan keberagaman masyarakat Madura yang patriarkhis dan kepentingan akan pelestarian kekuasaan pada sisi yang lain. Di samping itu, penting pula untuk melihat bahwa potensi perempuan sebagai bagian dari kapasitas yang dimiliki kaum perempuan perlu ditempatkan sebagai sesuatu yang penting dalam mengusung perempuan sebagai pemimpin dan pertimbangan penting dalam memilih. Karena dari beberapa fakta, perempuan Madura mempunyai kapasitas dan kabapalitas baik intelektualitasnya maupun *leadership*-nya. Untuk itu, penelitian ini menjadi sesuatu yang relevan sebagai respons terhadap berbagai pandangan dan fenomena yang mendiskreditkan dan menjadikan perempuan sebagai alat legitimasi.

Jika dilihat lebih mendalam, posisi *kaléibun bâbiné'* merupakan peran yang urgen bagi upaya pemberdayaan perempuan pada tingkat *grass root*, yaitu pada level desa. Di desa, perempuan lebih minim mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan informasi dibandingkan kaum perempuan di perkotaan. Sebagaimana data Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang dimuat di harian Kompas bahwa dari 74.000 desa, yang mempunyai kepala desa perempuan sekitar 3300 desa.⁷ Artinya, kesempatan perempuan memimpin pada tingkat desa masih minim sehingga kesempatan yang mulai terbuka ini seharusnya dioptimalkan oleh *kaléibun bâbiné'* dalam mengikutsertakan perempuan dalam pengambilan kebijakan di ranah publik.

Tulisan ini difokuskan pada konstruksi budaya Islam lokal masyarakat Madura. Lebih spesifik, tulisan ini meng-

ambil *background* Sumenep yang mempunyai kultur keraton dan agama yang cukup kuat, di samping jumlah sekolah agama dan pesantren yang terbanyak di Pulau Garam ini. Pesantren menjadi *center* budaya masyarakat di sekitarnya. Artinya, masyarakat di mana terdapat pesantren, maka budaya agamisnya sangat tampak.

Dari paparan di atas, studi tentang keberadaan perempuan sebagai *kaléibun* dalam konteks lokalitas perlu dihadirkan. Kajian ini lebih ditekankan pada *culture qualitative field research* yaitu menempatkan perempuan dalam latar belakang budaya. Untuk melihat persoalan tersebut, penulis akan menggunakan empat pendekatan:⁸ *pertama*: pendekatan subjektif, di mana tulisan ini memandang perempuan sebagai kelompok yang sadar memahami posisi kultural dan strukturalnya. Pendekatan ini penting untuk memandang perempuan dari dalam perempuan itu sendiri (*inside view*). Sehingga tidak ada penilaian positif atau negatif yang diberikan oleh pihak luar. Penelitian dengan pendekatan ini berusaha membangun konsep, nilai, dan ukuran yang didefinisikan oleh perempuan itu sendiri.

Kedua, pendekatan relasional. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kelas dan status didasarkan pada hubungan-hubungan yang terbentuk. Dalam hal ini, pendekatan ini melihat laki-laki sebagai pihak yang mengontrol peran dan status perempuan dalam konstruksi sosial, kultural, dan struktural.

Ketiga, pendekatan struktural. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat struktur yang terbentuk dari sejarah atau alasan yang ada di baliknya. Analisis ini

⁷ Harian Kompas, edisi Sabtu, 24 Januari 2015

⁸ Sebagaimana dipaparkan oleh Olesen yang dikutip oleh Irwan Abdullah dalam *Sex, Gender dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 14-16

penting untuk menguji tentang bagaimana keikutsertaan perempuan dalam politik kekuasaan dilihat dari akar yang mendasarinya.

Keempat, pendekatan kebijakan sosial, yaitu penelitian ini dilihat sebagai sebagai sebuah *fenomene* yang dapat diterjemahkan dalam sebuah konsep dan kebijakan. Sehingga penelitian dapat dijadikan indikator kebijakan sosial yang menyangkut perempuan.

Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap perempuan jika dilihat dari peran dan status tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang atau situasi budaya dan kultur yang mengitarinya. Pandangan umum yang menempatkan kajian ini secara umum dan global akan semakin melihat perempuan pada posisi yang tidak sepadan dan semakin timpang dalam sebuah relasi kuasa. Padahal dalam realitas konstruksi budaya dominan mendapatkan tempat dalam pembentukan peran dan status yang dilakoni kaum perempuan. Beberapa kekuatan tulisan tentang bagaimana melihat konstruksi budaya lokal terhadap peran gender laki-laki dan perempuan digambarkan dalam beberapa karya Irwan Abdullah seperti "*Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*",⁹ dan *Sex, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*".¹⁰ Tulisan ini menguraikan bahwa meneliti perempuan senantiasa dilihat dari konteks lokal dimana perempuan lahir, hidup, dan berproses di dalamnya. Lebih spesifik tulisan tentang *Partisipasi Politik Perempuan Dilihat dari Tradisi Islam*

⁹ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

¹⁰ Irwan Abdullah, *Sex, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Terawang Press, 2001)

Lokal,¹¹ yang menggambarkan peran politik perempuan di tengah kuatnya tradisi agama yang me-lingkupinya.

Fokus penelitian ini adalah pada konstruksi masyarakat terhadap perempuan, maka sebagaimana dalam tulisan Irwan Abdullah akan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan ruang yang lain. Sehingga penting mengkaji penelitian yang berkaitan dengan budaya Madura dan perempuan dalam budaya Madura. Beberapa tulisan tentang Madura telah banyak memberi informasi dalam tulisan ini, seperti tulisan Kuntowijoyo,¹² Huub De Jonge,¹³ maupun karya Iik Mansurnoor.¹⁴ Namun demikian, buku-buku tersebut tidak membicarakan perempuan Madura secara khusus akan tetapi lebih pada pembahasan geografis, kelas menengah, dan peran ulama di Madura. Namun demikian, buku tersebut sangat penting sebagai informasi awal tentang keberadaan *kaléibun*, terutama yang menyangkut peran administratifnya.

Penelitian ini juga berbeda dengan apa yang dilakukan Saputra¹⁵ yang meneliti relasi kiai langgar dan *kaléibun* di daerah kepulauan, tepatnya di Talango. Dalam laporan tersebut, ia menjelaskan

¹¹ M. Zainuri, *Partisipasi Politik Perempuan : Perspektif Tradisi Islam Lokal*, Tesis UNDIP, (Semarang: UNDIP, 2007)

¹² Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).

¹³ Jonge, Huub de, "Pembentukan Negara dengan Kontrak: Kabupaten Sumenep Madura, VOC dan Hindia Belanda, 1683-1883" dalam Huub de Jonge (ed.), *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

¹⁴ Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesia World: Ulama of Madura*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

¹⁵ Saputra, Endy, *Kiai Langgar and Kaléibun*, Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University, 2009.

bahwa *kaléibun* adalah tokoh yang secara budaya berjauhan dengan kultur kiai. Namun dalam penelitian lain ditemukan keterlibatan *kaléibun* dalam pusaran kekuasaan yang melibatkan pejabat dan kiai. Ini misalnya ditulis oleh Abdur Rozaki.¹⁶

Pembahasan yang secara mendalam tentang perempuan Madura adalah karya Anke Niehof, *Women and Fertility in Madura*¹⁷, di samping tulisan Helen yang memandang relasi laki-laki dan perempuan dalam kontek seni di Madura.¹⁸ Selain itu adalah karya disertasi penulis yang berjudul *Nyai Madura: Relasi Patron-Klien dengan Perempuan Madura*.¹⁹ Tulisan ini membahas perempuan sebagai elit agama (*nyai*) yang membangun relasi dengan perempuan sebagai klien yang ada di lingkungannya.

Berbagai karya di atas memberi informasi penting tentang perempuan, Madura, dan *kaléibun*. Akan tetapi, pembahasan utuh dan mendalam yang membahas bagaimana peran politik kekuasaan perempuan pada tingkat desa belum ditemukan. Ini sekaligus sebagai gambaran bahwa karya tentang perempuan Madura bisa dikatakan jarang atau sangat sedikit dibandingkan karya yang terkait dengan

budaya dan peran ulama di Madura. Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk membuka wacana dan realitas baru dari dinamika kehidupan perempuan Madura yang selama ini belum terungkap dan terepresentasikan dalam karya yang mendalam.

Signifikansi Tulisan bagi Kuasa Perempuan

Sebagai kajian tentang perempuan, tulisan ini diharapkan memberikan pencerahan wacana dan sebuah aksi nyata dalam memberi kesadaran terhadap masyarakat. Secara budaya, masyarakat Madura yang terbentuk dari pengetahuan keagamaannya dapat menempatkan keberadaan perempuan bukan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, akan tetapi lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan masyarakat. Secara politik, penelitian ingin menempatkan bahwa melakukan aktifitas politik kekuasaan seharusnya dengan etika penuh kesantunan dan tidak semata-mata menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan.

Bagian terpenting dari tulisan ini adalah sebagai upaya memahami dan memahami kemauan dan kemampuan perempuan sebagai bagian dari konteks budaya Islam lokal dan dalam gubangan kontestasi politik yang penuh dengan intrik dan kepentingan. Poin ini diharapkan mampu menciptakan relasi yang adil di masyarakat yang tidak mendiskreditkan perempuan. Sebagai fenomena budaya, posisi perempuan pada masyarakat Madura tidak dapat dilepaskan dari situasi masyarakat yang religius yang tertanam kuat dalam keluarga dan masyarakat. Posisi dominasi laki-laki seakan menemukan momentum ketika secara ideologis agama ikut berperan dalam

¹⁶ Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, Jogjakarta: Pustaka Marwa, 2004.

¹⁷ Niehof, Anke, *Women and fertility in Madura*, Leiden: Disertasi Rijksuniversiteit, 1985. Dan "The Changing lives of Indonesian Women: Contained Emancipation under Pressure" dalam *Globalization, Localization, and Indonesia* 154 No. 2 Leiden: Rijksuniversiteit, 1998 downloaded dari <http://www.kitlv-journals.nl>, 25 Februari 2008

¹⁸ Bouvier, Helen, *Lebur! Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*, Jakarta: Forum Jakarta-Paris dan Yayasan Obor, 2002.

¹⁹ Tatik Hidayati, *Nyai Madura : Relasi Patron Klien dengan Perempuan Pedesaan*, Disertasi, 2012 dan "kompolan dan Transformasi Sosial" penelitian 2011.

menskonstruksi di dalamnya. Pada posisi ini, tulisan ini bisa dijadikan alat penyadaran bagi kaum perempuan untuk juga bisa berperan penting dalam masyarakat. Sehingga tulisan ini sebagai suatu realitas yang bisa menjadi pertimbangan baru dalam mentransformasikan nilai-nilai agama yang lebih inklusif dan transformatif, terutama dalam memandang dan menempatkan perempuan.

Konstruksi Budaya Islam Lokal dan Posisi *Kaléibun Bâbiné'*

Berdasarkan empat pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, maka posisi *kaléibun bâbiné'* dapat kita lihat yang *pertama*, apa alasan perempuan pedesaan Madura menduduki posisi *kaléibun*? *Kedua*, tulisan ini ingin melihat secara relational bukan saja antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi termasuk seluruh agen sosial. *Ketiga*, apakah struktur terbentuknya *kaléibun*, dan bagaimana posisi perempuan selama ini dalam sistem *perkalébulan*.

Pengetahuan keagamaan masyarakat Madura tidak jarang dijadikan dasar dalam melakukan tindakan pribadi, keluarga, dan sosial. Dalam konteks ini, pengetahuan masyarakat telah terbentuk tentang bagaimana posisi perempuan sebagai pribadi, keluarga, dan dalam masyarakat. Bagaimana perempuan Madura bersikap, misalnya dalam cara berpakaian atau bergaul dengan lawan jenis. Atau juga bagaimana perempuan Madura dalam persoalan yang berkaitan dengan fiqh, seperti cara bersuci dari *hadats* atau bersuci dari najis, dan lain sebagainya.²⁰

1. Konstruksi Budaya

²⁰ Beberapa data ini penulis kumpulkan dari beberapa pesantren yang diasuh oleh nyai.

Pembahasan ini akan melihat perempuan Madura dari bingkai kultur masyarakat yang sudah terkonstruksi baik dalam keluarga dan masyarakat, maupun dalam status dan peran mereka secara individu maupun kelompok. Pada keluarga pedesaan Madura, peran dan status perempuan hampir sama dengan perempuan pedesaan di Jawa.²¹ Posisi perempuan sebagai anak akan mendapat perlakuan yang berbeda dalam pengasuhan dibanding dengan anak laki-laki, termasuk kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Ini berlaku juga dalam hal perjodohan, di daerah pedesaan Madura jika mempunyai anak perempuan umumnya dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya.²² Apabila si gadis ini menolak maka biasanya mereka dicap sebagai anak yang *ta' noro' oca'* (tidak taat kepada orang tua). Beberapa fakta lain di saat posisi perempuan Madura sebagai istri, maka pembagian ruang sosial perempuan dan laki-laki terbentuk. Wilayah dalam rumah, termasuk dapur, adalah milik perempuan dan wilayah luar rumah, termasuk *langgar*, sebagai tempat menerima tamu adalah ruang laki-laki. Sedang ruang publik perempuan pedesaan Madura adalah *kompolan* (kelompok pengajian), *lalabât* (istilah Madura dalam menyebut ta'ziah), *long-nolongi* (memberi bantuan). Ruang publik perempuan tersebut sekaligus menegaskan peran sosialnya dalam masyarakat.

²¹ Sebagaimana digambarkan oleh Warto, "Wanita Pabrik: Simbol Pergeseran Status Wanita Desa", dalam *Sangkan Paran Gender*, ed. Irwan Abdullah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 160-161.

²² Ini berkaitan dengan tradisi yang berkembang pada masyarakat Madura secara umum. Beberapa data ini dapat dibaca pada tulisan Mien Ahmad Rifa'I, *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 88-89.

Rendahnya tingkat pendidikan dan masih maraknya tradisi pernikahan dini pada anak perempuan di pedesaan, juga semakin menegaskan bahwa tradisi masyarakat Madura dikonstruks dengan budaya patriarkhi yang sangat kental, dan kuat di setiap ruang perempuan. Ini selanjutnya dapat menjadi pintu masuk untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas.

2. Pendekatan Subjektif

Sehingga penjelasan di atas dapat digunakan dalam memahami mengapa alasan perempuan menduduki posisi sebagai *kaléibun*, banyak dipengaruhi oleh *outside view* atau bukan muncul dari inisiatif *inside view* serta ambisi pribadi dirinya. Melainkan banyak didasarkan karena ada keinginan kuat dari orang di sekelilingnya, untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Berbagai fakta tersebut dapat dilihat dari berbagai pencalonan kepala desa yang diikuti kaum perempuan di beberapa desa.²³ Dari beberapa informasi yang didapat, motif mereka calon kepala desa adalah karena keinginan suami, bapak atau saudara yang sebelumnya menjabat sebagai *kaléibun* serta para pendukungnya. Karena tradisi yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dilindungi, di bawah pengarahannya sekaligus dihormati, maka seolah sudah menjadi kewajaran jika perempuan tunduk pada kemauan "kaum lelaki" sebagai wujud dari kepatuhan dan penghormatan perempuan terhadap mereka. Sebagaimana Foucault memaknai kekuasaan sebagai relasi kekuatan yang bersifat *imanen*, maka kecenderungan kekuasaan tersebut akan tetap diperjuangkan untuk

tetap berlangsung sebagai cara mencapai tujuan dengan berbagai perangkat dan kekuatan.²⁴ Terlebih jika dikuatkan pandangan kepemimpinan secara monarkhi yang memandang kekuasaan adalah sifatnya genetis, atau diturunkan secara ikatan kekeluargaan. *Kaléibun* dalam sejarah memang bukan kedudukan yang bersifat turun temurun, akan tetapi melalui *ceplo'an*, yaitu pemilihan langsung oleh warga desa. Kemudian disahkan melalui selebar kertas oleh pemerintahan terkait.²⁵

Pada bagian ini yang terpenting adalah apa yang sebenarnya yang diinginkan perempuan ketika mereka telah menjabat sebagai *kaléibun*? Apakah hanya sekedar menjalankan kepatuhan dan penghormatan yang pasif sebagai bentuk pengabdian terhadap para "laki-laki" yang menginginkan mereka menduduki jabatan tersebut atau justru mereka dapat menjadikan kepatuhan tersebut sebagai ekspresi perempuan untuk membangun kekuasaan mereka sendiri dan memainkan ruang kekuasaan, sehingga ia mampu menaklukan diri ke dalam kekuasaan dan mampu membuat keputusan-keputusan yang dapat berpengaruh terhadap publik.²⁶

3. Pendekatan Relasional

Selanjutnya, tulisan ini ingin melihat pola relasional yang terjadi dalam proses perempuan menjadi seorang *kaléibun*. Menyimpulkan apa yang terjadi pada motif awal perempuan menjadi calon *kaléibun*, maka bisa dilihat sebenarnya relasi dominatif-subordinatif begitu ken-

²³ Penulis sempat mendapatkan data mengenai hal ini di desa Kranjang, Delikan, dan seterusnya (bukan nama sebenarnya).

²⁴ Michel Foucault, *Sex dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 113-114.

²⁵ Rifa'i, *Manusia Madura*, hlm. 108.

²⁶ Sebagaimana diungkapkan oleh Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 207-208.

tara antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki dalam hal ini suami, bapak, atau saudara, mempunyai dominasi yang kuat dalam mendorong perempuan apakah dia sebagai anak, istri, dan saudara mereka. Sedangkan perempuan menjadi pihak yang tidak mempunyai pilihan dan kekuatan untuk menolak atau bersikap atas desakan dan kemauan yang didasarkan atas ambisi, kepentingan kekuasaan tanpa makna. Di sini terjadi proses dominasi yang dibentuk melalui *public transcrip*,²⁷ yaitu pelestarian relasi kuasa secara ideologi yang hegemonis dan formal, dalam konteks ini melalui lembaga keluarga yang diwujudkan dalam penanaman nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Madura.

Transcript ini dapat berbentuk tindakan atau perbuatan yang ditampakkan pada relasi yang sifatnya terbuka atau tersembunyi. Dalam hal ini seharusnya perempuan sebagai pihak yang ter subordinasi mampu melakukan *transcript* secara tersembunyi, ini yang dinamakan sebagai *hidden transcript*. Sehingga perempuan dalam posisinya sebagai *kaléibun* mampu melakukan perlawanan-perlawanan yang sifatnya tersembunyi terhadap tindakan dominatif yang terjadi pada dirinya. Bentuk perlawanan ini tidak selalu menentang nilai budaya dan agama yang berkembang pada masyarakat Madura, tetapi tetap memasuki wilayah kekuasaan, baik secara kultural maupun

formal, dan kemudian ia mampu memainkan ruang kekuasaan, sehingga ruang ini tetap tercipta model diplomasi, tawar-menawar, dan pemihakan terhadap kaum yang ter subordinasi, terutama perempuan.

Akan tetapi apabila perempuan tidak memunculkan kesadaran untuk melakukan tindakan sebagai bentuk perlawanan simbolik tadi, posisi *kaléibun* akan menjadi lembaga yang berperan melestarikan proses dominatif siapa pun yang menduduki dan akan tetap menempatkan perempuan secara subordinatif. Jika ini terjadi pada masyarakat desa, maka perempuan sebagai pihak yang resisten akan semakin terhegemoni baik dalam kultur dan struktur masyarakat Madura.

4. Pendekatan Struktural

Penjelasan selanjutnya akan melihat dengan analisis struktural, dalam hal ini akan melihat *kaléibun* sebagai struktur. *Kaléibun* sebagai sebuah institusi telah terbentuk mulai zaman Belanda, meskipun ini bukan suatu lembaga yang secara spesifik melakukan hegemoni terhadap perempuan, *kaléibun* merupakan jabatan yang identik dengan sifat maskulin. Bahkan tidak jarang *kaléibun* mempunyai kedekatan dengan *bâjing* atau *blater*. Ini dianggap penting karena untuk melindungi keamanan warga, sehingga kedekatan ini untuk mengendalikan mereka. Terlepas dari dalih dan alasan tersebut secara tradisi di beberapa tempat *kaléibun* juga dekat dengan tradisi yang bukan kalangan "santri" yang biasanya banyak mengisytikarat ritual keagamaan. Akan tetapi justru banyak mengakomodasi tradisi kaum "abangan", seperti *tandâk*,²⁸ *saronén*

²⁷ Sebagaimana diungkapkan oleh Scott, relasi kuasa terdapat pada dua tataran realitas, pertama adalah *public transcrit*, yaitu bentuk relasi yang bersifat terbuka antara pihak yang subordinat dan pihak yang mensubordinat dan kedua *hidden transcript* merupakan *transcript* dari kaum yang ter subordinasi dalam melakukakn perlawanan secara diam-diam atau tersembunyi. James Scott, *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcript* (New Haven and London: Yale University Press, 1990).

²⁸ Saputra, *Kiai Langgar*.

yang secara spesifik menjadikan perempuan sebagai objek hiburan seperti tempat menyawer dan berjoget bersama.

Sehingga tidak jarang posisi *kaléibun bâbiné'* hanya dijadikan simbol, karena secara budaya ia tidak dapat memasuki wilayah maskulinitas sebagaimana dipaparkan di atas. Padahal seharusnya *kaléibun bâbiné'* mampu menjadikan institusi *kaléibun* sebagai institusi yang bermanfaat dan bermartabat di mata masyarakat tanpa harus menoleransi perilaku yang secara norma tidak dapat dibenarkan. Ini bukan bagian dari melawan tradisi atau budaya, akan tetapi lebih pada melakukan proses perubahan dalam masyarakat secara nilai dan etika, sehingga tradisi dan budaya dapat dilestarikan dengan penuh keberadaban.

Penutup

Di akhir tulisan ini, penulis mengajak melakukan suatu refleksi dari beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa desa dalam melakukan proses demokrasi pada tingkat yang paling bawah yaitu desa, perlu diikuti oleh kesadaran secara kultur bahwa masyarakat Madura menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, yang penuh dengan kesantunan dan kehormatan. Sehingga cara dalam mewujudkan nilai tersebut jangan sampai diciderai oleh politik kekuasaan yang tanpa makna (politik yang tercerabut dari akar sejarah budaya lokal),²⁹ dengan mengotori melalui politik uang yang seakan-akan sudah menjadi bagian dari budaya kita, atau melakukan berbagai cara untuk tetap melestarikan kekuasaan termasuk mengeksploitasi kaum perempuan sebagai alat kekuasaan.

Apabila upaya untuk menghadirkan kepemimpinan desa yang demokratis, santun, dan bermartabat dilakukan oleh seluruh agen sosial, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan mempunyai kesadaran moral kolektif tentang perlunya integritas pemimpin. Siapa pun yang akan menjadi pemimpin, bukan semata-mata mereka laki-laki atau perempuan, keturunan *kaléibun* atau bukan, sampai pada seberapa banyak mereka mampu membagikan uang. Komitmen tentang integritas kepemimpinan sekaligus akan mengeliminasi hasrat untuk melestarikan kekuasaan, termasuk menjadikan perempuan sebagai alat kekuasaan. Kerena kepemimpinan yang bersih tidak membuat mereka sibuk menutupi kebobrokan dan kecurangan yang terjadi di saat mereka menjabat. []

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- . *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- . *Sex, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Terawang Press, 2001.
- Bouvier, Helen. *Lebur! Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*. Terj. Rahayu S. Hidayat dan Jean Couteau. Jakarta: Forum Jakarta-Paris dan Yayasan Obor, 2002.
- Foucault, Michel. *Sex dan Kekuasaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Geertz, Clifford. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Handayani, Christina S. dan Ardhian Novianto. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 2008.

²⁹ Penjelasan tentang politik makna dapat dibaca dalam tulisan Clifford Geertz, *Politik Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 138-155.

- Hidayati, Tatik. *Kompolan dan Transformasi Sosial*. Penelitian 2011.
- . *Nyai Madura: Relasi Patron Klien dengan Perempuan Pedesaan*, Disertasi Program Pascasarjana UGM Yogyakarta, 2012.
- Jonge, Huub de. "Pembentukan Negara dengan Kontrak: Kabupaten Sumenep Madura, VOC dan Hindia Belanda, 1683-1883" dalam *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*. Ed. Huub de Jonge. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Mansurnoor, Iik Arifin. *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Niehof, Anke. "The Changing Lives of Indonesian Women: Contained Emancipation under Pressure" dalam *Globalization, Localization, and Indonesia* 154 No. 2 Leiden: Rijksuniversiteit, 1998. Diakses dari <http://www.kitlv-journals.nl>, 25 Februari 2008.
- Niehof, Anke. *Women and Fertility in Madura*. Disertasi Rijksuniversiteit, Leiden, 1985.
- Rifa'i, Mien Ahmad. *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Rozaki, Abdur. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*. Jogjakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Saputra, Endy. *Kiai Langgar and Kalébung*, Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University, 2009.
- Scott, James. *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcript*. New Haven and London: Yale University Press, 1990.

